

Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Banjir

Septi Wulandari^{1*}, Musta'ana², Hanna Putri Hendani³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bojonegoro,
Indonesia

*Coressponding author: septiwuland09@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 April
2024]

Revised [24 April
2024]

Accepted [1 May 2024]

KATA KUNCI

Banjir; infrastruktur;
pengendalian banjir

KEYWORDS

Flood; infrastructure;
flood control

This work is licensed
under a



ABSTRAK

kerentanan Bojonegoro terhadap bencana alam banjir menyebabkan pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam melindungi masyarakatnya. Untuk menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana implementasi Perda No 24 Tahun 2007. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menekankan pentingnya evaluasi rutin, optimalisasi sumber daya manusia dan keuangan, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung. Studi menunjukkan bahwa untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir, diperlukan peningkatan ketinggian tanggul dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan aturan untuk mengendalikan banjir di Kabupaten Bojonegoro masih dihadapi oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat.

ABSTRACT

Bojonegoro's vulnerability to natural disasters, government flooding, means that the region needs to play an active role in protecting its people. To handle disaster management in Bojonegoro Regency, the Regency Government established a Regional Disaster Management Agency (BPBD) in accordance with Law Number 24 of 2007. The aim of this research is to see the extent of implementation of Regional Regulation No. 24 of 2007. This study uses qualitative descriptive methods and pressure. the importance of routine evaluation, optimization of human and financial resources, characteristics of implementers, attitudes of implementers, communication between organizations, as well as supporting economic, social and political conditions. Studies show that to build flood control infrastructure, increasing the height of embankments and community participation is needed. The implementation of regulations to control floods in Bojonegoro Regency is still faced with various challenges, one of which is the lack of community interaction.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana (Riza et al., 2020). Menurut data dari BNPB, sepanjang tahun 2013 hingga November 2013 terdapat 973 kejadian bencana. Dua musim yang ada di Indonesia juga menjadi masalah tahunan, yaitu banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang hingga kini belum ditemukan solusinya.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor

alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU Nomor 24 Tahun 2007). Setiap kejadian bencana pasti menimbulkan korban dan kerugian materi, sehingga sangat penting untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. (Prima Ari Pratiwi et al., 2020)

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010-2014, kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir tersebar di lima pulau besar di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Timur, yang memiliki 18 kabupaten/kota berisiko tinggi terhadap banjir, seperti Sidoarjo, Lamongan, Jombang, dan Bojonegoro. Keberadaan Sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, menjadi salah satu faktor penyebab beberapa daerah di Jawa Timur termasuk dalam kawasan rawan banjir, terutama daerah yang dilalui sungai tersebut, seperti Kabupaten Bojonegoro. (Prima Ari Pratiwi et al., 2020)

Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa daerah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo merupakan dataran rendah (floodplain area), yang menyebabkan banjir di kabupaten ini hampir setiap tahun. Banjir pada tahun 2007 adalah yang terparah, dengan kedalaman air mencapai 3 meter dan merendam 114 desa di 14 kecamatan. Pada bulan Mei 2010, banjir merendam 3.511 hektare tanaman padi, 176 hektare tegalan, serta 483 hektare tanaman palawija, dan juga pemukiman di 94 desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan. Tanggul Sungai Bengawan Solo sepanjang 51 meter juga jebol di beberapa desa. Kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai 27,3 miliar rupiah, terutama karena kerusakan infrastruktur dan tanaman padi yang gagal panen setelah terendam selama tiga hari. Terbaru, banjir pada bulan Desember 2013 merendam 126 desa di 14 kecamatan. (Kompas.com, 2024)

Pada bulan Mei 2010, banjir melanda 3.511 hektar tanaman padi, 176 hektar lahan tegalan, dan 483 hektar tanaman palawija. Selain itu, banjir juga merendam pemukiman penduduk di 94 desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan. Banjir tersebut juga menyebabkan tanggul Bengawan Solo jebol sepanjang 51 meter di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro, dan Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor. (*Satu Data Bojonegoro*, n.d.) Banjir juga merusak 11 gedung SD dan empat tempat ibadah. Kerugian yang ditimbulkan oleh banjir diperkirakan mencapai 27,3 milyar rupiah. Kerugian terbesar disebabkan oleh kerusakan infrastruktur dan gagal panen tanaman padi yang terendam selama tiga hari. Terbaru, banjir melanda Bojonegoro pada bulan Desember 2013, menggenangi 126 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Daerah yang tergenang banjir berada di sekitar Sungai Bengawan Solo. Ke-14 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan

Ngraho, Padangan, Kalitidu, Kasiman, Gayam, Malo, Trucuk, Dander, Kota Bojonegoro, Kapas, Kanor, Sumberejo, dan Baureno. (ANTARA, 2024)

Bencana di Bojonegoro saat ini tidak hanya terbatas pada banjir. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, terdapat 7 jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Bencana-bencana tersebut meliputi banjir bandang, banjir Sungai Bengawan Solo, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, kekeringan, dan dampak industri. Wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro, mulai dari Kecamatan Kepohbaru hingga Kecamatan Tambakrejo, serta Kecamatan Kedewan hingga Kecamatan Kasiman, sangat rentan terhadap tanah longsor. (*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, n.d.*)

Dari ketujuh jenis bencana tersebut, banjir Bengawan Solo merupakan bencana dengan tingkat kerugian tertinggi. Hal ini berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro tahun 2013. (*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, n.d.*) Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2013

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Kerugian (Rp)
1	Banjir Bengawan Solo	7	65.180.542.500
2	Banjir Bandang	13	390.600.000
3	Tanah Longsor	19	167.000.000
4	Angin Kencang	38	942.565.000
5	Kebakaran	48	37.415.500.000
6	Kekeringan	16 kec/43 desa	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro

Dari tabel di atas terlihat bahwa banjir Bengawan Solo merupakan bencana dengan tingkat kerugian tertinggi dibandingkan bencana lainnya. Berdasarkan tabel tersebut, juga diketahui bahwa meskipun banjir Bengawan Solo memiliki jumlah kejadian bencana yang paling sedikit, kerugian yang ditimbulkannya paling besar dibandingkan dengan bencana lainnya.

Melihat kerentanan Bojonegoro terhadap bencana alam, Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam melindungi masyarakatnya. Untuk menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang organisasi dan

tata kerja lembaga di Kabupaten Bojonegoro. Dengan diterbitkannya Perda tersebut, pemerintah resmi membentuk BPBD Bojonegoro. (Suhindarno, 2021). Mengingat pentingnya penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, peraturan hanya pada tingkat kelembagaan belum memadai. Oleh karena itu, pada tahun 2012, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana. (*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, n.d.; Satu Data Bojonegoro, n.d.*)

Penerbitan Perda No. 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro tentang Penanggulangan Bencana tidak hanya bertujuan untuk memastikan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. (*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, n.d.; Satu Data Bojonegoro, n.d.*). Tujuan diterbitkannya Perda Kabupaten Bojonegoro No. 07 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, yang dijelaskan pada Pasal 2, adalah sebagai berikut: (Yulianti, Dwi; Huda, Miftahul; Suhindarno, 2024)

Pasal 2

Tujuan penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya bencana.
2. Meminimalkan jumlah korban akibat bencana.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
4. Memelihara keamanan, kelestarian, dan keharmonisan lingkungan.
5. Mendorong partisipasi dan kemitraan antara publik dan swasta dalam upaya penanggulangan bencana.
6. Memperkuat semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penanggulangan Bencana masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan penulis, pemerintah masih lambat dalam menangani bencana yang terjadi dan bantuan kepada korban masih kurang memadai. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti, warga Bojonegoro, sebagai berikut:

"Pemerintah itu lambat, mas, kalau memberi bantuan. Pernah banjir sudah sehari baru ada petugas yang membantu. Selain itu, bantuan yang diberikan kadang masih kurang, mas" (wawancara 15 februari 2024). Oleh karena itu, pemerintah Bojonegoro seharusnya lebih cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi.

Tidak hanya itu, masalah bencana yang muncul mencakup juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan bencana. Banyak di lapangan ditemukan masyarakat yang mengandalkan orang yang mengerti tentang prosedur pelaporan bencana untuk melaporkan kejadian bencana tersebut. (Ayuningtyas et al., 2021) Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Ali selaku masyarakat Bojonegoro sebagai berikut:

“Kalau untuk masalah pelaporan (bencana), saya sendiri tidak tahu, mas. Jadi kalau ada bencana, biar orang yang tahu saja yang melakukannya (melaporkan bencana), kalau saya membantu (menangani bencana) saja”. (wawancara 15 februari 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki "Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus: Penanggulangan Banjir Bengawan Solo)". Penelitian dengan judul ini akan dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, yang mengevaluasi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia (termasuk manusia, dana, dan waktu), karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi. (Fauziyah & Arif, 2021) Teori Model Implementasi ini dipilih karena dianggap sebagai model yang paling komprehensif dan sesuai untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana.

Metode (12pt, Palatino Linotype, bold)

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna dari individu atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam suatu isu sosial tertentu. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, dengan fokus pada konteks, proses, dan perspektif subjektif yang dialami oleh partisipan. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku, persepsi, sikap, dan pengalaman manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan kualitatif adalah kemampuannya untuk menangkap kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia. Dengan menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis konten, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang kaya dan mendalam tentang aspek-aspek subjektif dari fenomena yang diteliti. (Nasir & Sukmawati, 2023).

Pendekatan deskriptif dalam metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sesuai dengan apa yang ditemukan secara langsung di lapangan. Metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono, adalah cara untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini memilih pendekatan deskriptif karena ingin menjelaskan fenomena yang ditemukan dari berbagai sumber data dalam bentuk narasi. (Sugiyono, 2009)

Hasil dan Pembahasan (12pt, Palatino Linotype, bold)

Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan hasil yang variatif dalam mengendalikan dan menanggulangi banjir. Teori pemerintahan lokal menyarankan bahwa peraturan-peraturan seperti ini menjadi landasan penting dalam upaya mengelola bencana alam di tingkat lokal. Salah satu aspek utama dari peraturan ini adalah pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul dan saluran drainase. Teori infrastruktur menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana alam. (Drennan & Morrissey, 2020) Menurut Responden T, yang merupakan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, "Kami telah membangun beberapa tanggul dan saluran drainase utama, namun pemeliharaan masih menjadi tantangan karena keterbatasan anggaran." Teori manajemen anggaran menyoroti peran anggaran dalam mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur, pemeliharaan menjadi masalah serius yang perlu diatasi.

Responden A, seorang warga setempat, menambahkan, "Tanggul yang baru dibangun memang membantu, tapi sering kali tidak cukup tinggi saat air sungai meluap." Teori rekayasa sipil menekankan perlunya desain infrastruktur yang mempertimbangkan tingkat risiko dan kemungkinan bencana yang ekstrem. (Hayatul Khairul Rahmat et al., 2021) Pernyataan ini menggambarkan bahwa infrastruktur yang ada mungkin tidak memadai dalam menghadapi banjir ekstrem, sehingga diperlukan evaluasi dan penyesuaian desain serta konstruksi yang lebih baik.

Selain masalah teknis, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur juga belum optimal. Teori partisipasi masyarakat menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan bencana. (Mugambwa et al., 2020) Responden R, seorang tokoh masyarakat, menyatakan, "Kami diajak gotong royong untuk membersihkan saluran air, tapi masih banyak warga yang kurang peduli dan tetap membuang sampah sembarangan." Teori perilaku manusia menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam

konteks keberlanjutan lingkungan.(Prima Ari Pratiwi et al., 2020)(Ishiwatari & Sasaki, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat masih rendah, dan upaya gotong royong tidak cukup jika tidak didukung oleh perubahan perilaku warga.

Responden B, seorang petani, menambahkan, "Saluran irigasi sering tersumbat sampah, dan kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membersihkannya sendiri." Teori ekonomi lingkungan menekankan perlunya internalisasi biaya lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi.(Riza et al., 2020) Ini menunjukkan bahwa selain partisipasi yang rendah, kurangnya kesadaran tentang dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan juga menambah beban finansial bagi warga yang terdampak langsung. Tanpa dukungan penuh dari masyarakat, upaya pemerintah dalam mengendalikan banjir tidak akan maksimal.

Pentingnya Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Program sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berpartisipasi dalam program pengendalian banjir telah dilaksanakan. (Sholihah et al., 2020)Teori komunikasi pembangunan menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan relevan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut masih kurang maksimal. (Kurniawan et al., 2021). Responden M, pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengatakan, "Kami rutin mengadakan sosialisasi melalui radio dan pertemuan warga, tetapi kehadiran warga sering kurang maksimal." Teori partisipasi publik menekankan pentingnya menciptakan ruang partisipatif yang inklusif bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan.(Drennan & Morrissey, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara rutin, efektivitasnya masih rendah karena tingkat partisipasi yang minim.

Responden N, seorang ibu rumah tangga, menyebutkan, "Saya pernah ikut sosialisasi, tetapi informasi yang diberikan tidak selalu jelas dan seringkali hanya diikuti oleh segelintir orang." Ini menunjukkan bahwa selain rendahnya partisipasi, kualitas informasi yang disampaikan juga perlu diperbaiki agar lebih mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat luas.

Kesadaran lingkungan di kalangan anak-anak mulai meningkat melalui pendidikan di sekolah.(Ayuningtyas et al., 2021) Responden S, seorang guru sekolah dasar, berkomentar, "Anak-anak mulai diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, tapi orang tua mereka masih belum banyak yang sadar." Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pendidikan lingkungan di kalangan anak-anak, efeknya masih terbatas karena orang tua belum sepenuhnya sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan.

Responden D, seorang pemuda desa, menambahkan, "Saya dan teman-teman sudah mulai ikut kampanye bersih lingkungan, tapi banyak warga yang masih apatis." Ini menggambarkan bahwa ada inisiatif dari kelompok pemuda, namun tantangan utama tetap pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat luas. Program sosialisasi dan edukasi harus lebih efektif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. (Zamroni et al., 2020)

Perbaikan Koordinasi Antar Instansi

Hambatan birokrasi dan miskomunikasi antara instansi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi peraturan ini. Teori koordinasi antar-organisasi menyoroti pentingnya kerjasama dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. (Drennan & Morrissey, 2020; Kurniawan et al., 2021) Responden K, pegawai pemerintah daerah, menjelaskan, "Koordinasi antar-instansi sering terhambat oleh birokrasi yang rumit, dan ini memperlambat respons dalam situasi darurat." Hal ini menunjukkan bahwa prosedur birokrasi yang kompleks menghambat efektivitas respons terhadap situasi darurat, termasuk penanganan banjir.

Responden E, pegawai di dinas lingkungan hidup, mengutarakan, "Seringkali ada miskomunikasi antara departemen, sehingga tindakan yang diambil tidak sinkron." Ini menunjukkan bahwa selain prosedur yang rumit, masalah komunikasi antar-departemen juga menjadi penghalang dalam pelaksanaan program pengendalian banjir yang terpadu dan efektif.

Upaya untuk memperbaiki koordinasi telah dilakukan dengan mengadakan rapat rutin dan mempercepat prosedur birokrasi. (Hayatul Khairul Rahmat et al., 2021) Responden J, kepala desa, menyatakan, "Kami mencoba memperbaiki komunikasi dengan mengadakan rapat rutin antar-departemen, tetapi masih perlu banyak perbaikan." Ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah untuk meningkatkan koordinasi, hasilnya belum sepenuhnya optimal.

Responden L, anggota DPRD, menambahkan, "Ada upaya untuk mempercepat prosedur, tapi butuh waktu untuk mengubah budaya birokrasi yang sudah lama ada." Ini menegaskan bahwa perubahan signifikan dalam koordinasi antar-instansi memerlukan waktu dan usaha yang konsisten untuk mengubah budaya birokrasi yang sudah terbentuk lama. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait sangat penting untuk respons yang lebih cepat dan efektif dalam situasi darurat.

Dampak Implementasi Peraturan

Implementasi Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2012 telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan banjir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beberapa wilayah yang sebelumnya rawan banjir mengalami penurunan intensitas dan frekuensi banjir setelah pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Responden F, pedagang di pasar, berpendapat, "Banjir sudah berkurang sejak ada tanggul baru, tapi saat hujan deras masih terjadi genangan di beberapa tempat." Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pengurangan banjir secara umum, masalah genangan masih ada di beberapa lokasi.

Responden H, petani, mengemukakan, "Sawah kami lebih jarang kebanjiran sekarang, meski kadang masih ada air yang merembes." Ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi lebih baik, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan total terhadap lahan pertanian.

Peningkatan kualitas hidup juga dirasakan oleh masyarakat, dengan berkurangnya gangguan banjir terhadap aktivitas sehari-hari dan stabilitas hasil pertanian dan perikanan. (Ishiwatari & Sasaki, 2021; Riza et al., 2020) Responden I, ibu rumah tangga, menyebutkan, "Dengan berkurangnya banjir, kehidupan sehari-hari kami menjadi lebih tenang, anak-anak bisa bersekolah tanpa terganggu." Ini menunjukkan bahwa pengurangan banjir memiliki dampak langsung pada kualitas hidup sehari-hari masyarakat.

Responden G, nelayan, menambahkan, "Hasil tangkapan ikan lebih stabil karena tidak terganggu banjir besar." Ini menegaskan bahwa stabilitas dalam pekerjaan dan mata pencaharian juga meningkat sebagai dampak positif dari pengendalian banjir yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada kendala, implementasi peraturan ini telah membawa perubahan positif yang signifikan bagi Masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti hasil dari implementasi Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2012 tentang pengendalian dan penanggulangan banjir di Kabupaten Bojonegoro, yang telah membawa dampak positif meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Meskipun infrastruktur pengendalian banjir telah berhasil dibangun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pemeliharaan dan efektivitasnya yang masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga melalui program sosialisasi dan edukasi lingkungan menjadi penting dalam memperkuat respon terhadap masalah banjir. Selain itu, koordinasi antar-instansi juga masih memerlukan perbaikan untuk mengatasi hambatan birokrasi dan meningkatkan respons dalam situasi darurat.

Meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, implementasi peraturan tersebut telah membawa perubahan positif, termasuk penurunan intensitas dan frekuensi banjir serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, untuk memastikan kesinambungan dan peningkatan efektivitas program pengendalian banjir, langkah-langkah lanjutan diperlukan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran yang lebih memadai, melanjutkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi antar-instansi, serta memanfaatkan teknologi yang tepat guna. Dengan demikian, diharapkan program pengendalian banjir dapat terus berkembang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro di masa mendatang.

Referensi (12pt, Palatino Linotype, bold)

- ANTARA. (2024). *BPBD: Banjir di Bojonegoro rendam 48 desa dan 1.880 hektare lahan* - ANTARA News.
- Ayuningtyas, D., Windiarti, S., Sapoan Hadi, M., Fasrini, U. U., & Barinda, S. (2021). Disaster Preparedness and Mitigation in Indonesia: A Narrative Review. *Iranian Journal of Public Health*, 50(8), 1536. <https://doi.org/10.18502/IJPH.V50I8.6799>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro. (n.d.).
- Drennan, L., & Morrissey, L. (2020). Resilience policy in practice — Surveying the role of community based organisations in local disaster management. *Local Disaster Management*, 36–57. <https://doi.org/10.4324/9781003036234-4>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAN METER DAN VAN HORN DALAM TINJAUAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN (RING ROAD) DI KABUPATEN TUBAN. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691.
- Hayatul Khairul Rahmat, -, Dewa Ketut Kerta Widana, -, A Said Hasan Basri, -, & Musyrifin, Z. (2021). *Analysis of Potential Disaster in The New Capital of Indonesia and its Mitigation Efforts: A Qualitative Approach*.
- Ishiwatari, M., & Sasaki, D. (2021). Investing in flood protection in Asia: An empirical study focusing on the relationship between investment and damage. *Progress in Disaster Science*, 12, 100197. <https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2021.100197>
- Kompas.com. (2024). *Sungai Bengawan Solo Meluap, 36 Desa di Bojonegoro Terendam Banjir Halaman all* - Kompas.com.
- Kurniawan, E., Suharini, E., & Dafip, M. (2021). How Far Disaster Management Implemented Toward Flood Preparedness: A Lesson Learn from Youth Participation Assessment in Indonesia. *Article in International Journal of Safety and Security Engineering*. <https://doi.org/10.18280/ijss.110206>
- Mugambwa, J., Nabeta, I. N., Ngoma, M., Rudaheranwa, N., Kaberuka, W., & Munene, J. C. (2020). *Policy Implementation: A Review of Selected Literature*. 91–116. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42970-6_5
- Nasir, N., & Sukmawati, S. (2023). Analysis of Research Data Quantitative and

- Qualitative. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 368–373.
- Prima Ari Pratiwi, E., Laily Ramadhani, E., Nurrochmad, F., Legono, D., & Grafika No, J. (2020). The Impacts of Flood and Drought on Food Security in Central Java. *Journal of Civil Engineering Forum*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.22146/jcef.51782>
- Riza, H., Santoso, E. W., Gunawan Tejakusuma, I., & Prawiradisastra, F. (2020). Advancing Flood Disaster Mitigation in Indonesia Using Machine Learning Methods. *7th International Conference on ICT for Smart Society: AIoT for Smart Society, ICISS 2020 - Proceeding*. <https://doi.org/10.1109/ICISS50791.2020.9307561>
- Satu Data Bojonegoro. (n.d.).
- Sholihah, Q., Kuncoro, W., Wahyuni, S., Puni Suwandi, S., & Dwi Feditasari, E. (2020). The analysis of the causes of flood disasters and their impacts in the perspective of environmental law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 437(1), 012056. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/437/1/012056>
- Sugiyono, 2019. (2009). *Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuant.pdf*.
- Suhindarno, H. (2021). STRATEGI BPBD DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Kasus di Kantor BPBD Bojonegoro). *IAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro*, 5(2), 22.
- Yulianti, Dwi; Huda, Miftahul; Suhindarno, H. (2024). Adaptive Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5870>
- Zamroni, A., Kurniati, A. C., Nur, H., & Prasetya, E. (2020). The assessment of landslides disaster mitigation in Java Island, Indonesia: a review. *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology*, 5(3), 124–128. <https://doi.org/10.25299/JGEET.2020.5.3.4676>